

KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA DAN FAKTA ETNIS CINA DI INDONESIA SEBAGAI BUKTI KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA

Riefky Krisnayana
Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Komunikasi Lintas budaya adalah proses dimana dialihkan ide atau gagasan suatu budaya yang satu kepada budaya yang lainnya dan sebaliknya, dan hal ini bisa antar dua kebudayaan yang terkait ataupun lebih, tujuannya untuk saling mempengaruhi satu sama lainnya, baik itu untuk kebaikan sebuah kebudayaan maupun untuk menghancurkan suatu kebudayaan, atau bisa jadi sebagai tahap awal dari proses akulturasi (penggabungan dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan kebudayaan yang baru).” Kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Kata Kunci: Komunikasi lintas budaya, fakta, etnis Cina

ABSTRACT

Communication Cross-culture is the process by which diverted the idea or the idea of a culture of the culture of the other and vice versa, and it can be between two cultures associated or more, in order to influence each other, whether it's for the good of a culture or to destroy a culture, or it could be an initial step of the process of acculturation (the merger of two cultures or that generate new culture). "culture is a complex whole, which has in it the knowledge, belief, art, morals, law, customs, other capabilities and habits acquired by man as a member of society.

Keywords: cross-cultural communication, facts, ethnic Chinese

I. Pendahuluan

Keberadaan etnis Cina di Indonesia diperkirakan sudah ada sejak abad ke-5. Hal itu ditunjukkan oleh kunjungan Fa-Hsien, Seorang pendeta Budha ke Indonesia pada abad awal tarikh masehi (Kwartanada, 1996: 24; Djie, 1995: 20).

Dengan adanya fakta yang demikian, berarti etnis Cina sudah hadir kurang lebih 15 abad, jauh sebelum bangsa Belanda menjajah di Indonesia. Tahun kedatangan pendeta Budha itu lebih jauh lagi jika dibandingkandengan tahun terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI), yang diproklamkan 17 Agustus 1945 lalu.

Bukti lain tentang keberadaan etnis Cina di Indonesia adalah berupa keikutsertaan muslim Cina untuk membangun Kesultanan Demak. Kesultananor) Demak merupakan salah satu pusat pemerintahan Islam pertama di bumi Nusantara ini. Muslim Cina ini adalah para musafir muslim yang bermazhab

Hanafi yang terdampar, dan kemudian membangun sebuah mesjid di Semarang (Rochmawati, 2004: 115). Rentang waktu sejak dari kunjungan pendeta Budha hingga negara Indonesia diproklamkan lebih dari 1000 tahun. Dalam rentang waktu itu, kiprah etnis Cina di Nusantara ini sudah banyak, walaupun sejarah mencatat bahwa kiprah mereka itu dominan di bidang perdagangan. Selama itu pula, sudah banyak orang Cina yang lahir, mati dan dikuburkan di bumi Pertiwi ini. Dengan kata lain, etnis Cina di bumi Indonesia sudah lama beranak-pinak. Mencermati keberadaan etnis Cina yang sudah beberapa generasi tinggal di bumi Indonesia, seharusnya keberadaan mereka tidak perlu lagi dipermasalahkan. Hanya karena kebetulan mereka itu etnis Cina, namun sudah banyak di antara etnis Cina itu tidak lagi mengetahui letak tanah leluhurnya. Beberapa di antara mereka pun

sudah banyak yang tidak mengerti bahasa leluhurnya. Berdasarkan fakta itu, proses pembentukan Indonesia menjadi sebuah negara-bangsa juga melibatkan etnis Cina, sehingga dalam perkembangannya pun etnis Cina merupakan bagian integral dari perjalanan sejarah Indonesia. Gagasan mengenai nasion Hindia Belanda (Indonesia) dengan tidak melihat latar belakang etnik, budaya, agama, bahasadan ras sudah dimulai sejak tahun 1917, yang dilakukan oleh dr. Tjipto Mangunkusumo. Beliau ini melontarkan sebuah gagasan tentang warga negara Hindia Belanda di masa depan, yaitu harus terdiri atas semua golongan yang menganggap negara Indonesia sebagai tanah airnya. Negara Indonesia sebagai tanah airnya tidak sebatas pengakuan saja, tetapi harus diwujudkan dengan keaktifannya ikut mengembangkan negara Indonesia itu (Suryadinata, 1984: 159). Mengikuti jalan pemikiran dr. Tjipto ini, di dalamnya ada semangat untuk merangkul semua golongan ataupun etnis yang pada saat itu berada di wilayah Hindia Belanda (Indonesia) untuk bersatu padu membangun Indonesia baru ke depan.

II. Tujuan Mempelajari Komunikasi

1. Menyadari bias budaya sendiri

2. Lebih peka secara budaya
3. Memperoleh kapasitas untuk benar-benar terlibat dengan anggota dari budaya lain untuk menciptakan hubungan yang langgeng dan memuaskan orang tersebut.
4. Merangsang pemahaman yang lebih besar atas budaya sendiri
5. Memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang
6. Mempelajari keterampilan komunikasi yang membuat seseorang mampu menerima gaya dan isi komunikasinya sendiri.
7. Membantu memahami budaya sebagai hal yang menghasilkan dan memelihara semesta wacana dan makna bagi para anggotanya
8. Membantu memahami kontak antar budaya sebagai suatu cara memperoleh pandangan ke dalam budaya sendiri: asumsi-asumsi, nilai-nilai, kebebasan-kebebasan dan keterbatasan-keterbatasannya.
9. Membantu memahami model-model, konsep-konsep dan aplikasi-aplikasi bidang komunikasi antar budaya.
10. Membantu menyadari bahwa sistem-sistem nilai yang berbeda dapat

dipelajari secara sistematis, dibandingkan, dan dipahami.

III. Alasan mempelajari komunikasi lintas budaya menurut Litvin (1977) :, Litvin (1977) :

- Dunia sedang menyusut dan kapasitas untuk memahami keanekaragaman budaya sangat diperlukan.
- Semua budaya berfungsi dan penting bagi pengalaman anggota-anggota budaya tersebut meskipun nilai-nilainya berbeda.
- Nilai-nilai setiap masyarakat se”baik” nilai-nilai masyarakat lainnya.
- Setiap individu dan/atau budaya berhak menggunakan nilai-nilainya sendiri.
- Perbedaan-perbedaan individu itu penting, namun ada asumsi-asumsi dan pola-pola budaya mendasar yang berlaku.
- Pemahaman atas nilai-nilai budaya sendiri merupakan prasyarat untuk mengidentifikasi dan memahami nilai-nilai budaya lain.

- Dengan mengatasi hambatan-hambatan budaya untuk berhubungan dengan orang lain kita memperoleh pemahaman dan penghargaan bagi kebutuhan, aspirasi, perasaan dan masalah manusia.
- Pemahaman atas orang lain secara lintas budaya dan antar pribadi adalah suatu usaha yang memerlukan keberanian dan kepekaan. Semakin mengancam pandangan dunia orang itu bagi pandangan dunia kita, semakin banyak yang harus kita pelajari dari dia, tetapi semakin berbahaya untuk memahaminya
- Keterampilan-keterampilan komunikasi yang diperoleh memudahkan perpindahan seseorang dari pandangan yang monokultural terhadap interaksi manusia ke pandangan multikultural.
- Perbedaan-perbedaan budaya menandakan kebutuhan akan penerimaan dalam komunikasi, namun perbedaan-perbedaan tersebut secara arbitrer tidaklah menyusahkan atau memudahkan.
- Situasi-situasi komunikasi antar budaya tidaklah statik dan bukan pula

stereotip. Karena itu seorang komunikator tidak dapat dilatih untuk mengatasi situasi. Dalam konteks ini kepekaan, pengetahuan dan keterampilannya bisa membuatnya siap untuk berperan serta dalam menciptakan lingkungan komunikasi yang efektif dan saling memuaskan.

IV. Pengertian identitas budaya

Identitas Budaya merupakan :

- Rincian karakteristik atau ciri kebudayaan yang dimiliki sekelompok orang yang kita ketahui batas-batasnya ketika dibandingkan dengan karakteristik atau ciri-ciri kebudayaan lain. (Alo Liliweri; 72)

Peran identitas budaya :

- Identitas budaya ditentukan oleh struktur budaya dan struktur sosial
 - Struktur budaya: pola persepsi, berpikir, perasaan
 - Struktur sosial: pola perilaku sosial
- Peran diartikan sebagai seperangkat harapan budaya terhadap posisi tertentu

- Pemahaman akan identitas memudahkan komunikasi antar budaya
Identitas budaya dalam kehidupan sehari-hari:
- Tampak melalui tatanan berpikir, perasaan dan cara bertindak pada sekelompok orang tersebut
- Tampak melalui bahasa yang dipakai
- Tampak melalui ciri-ciri khas (tubuh, pakaian, makanan, hasil kebudayaan, adat istiadat)
Perspektif terhadap identitas budaya (Martin dan Nakayama) :
- Perspektif psikologi sosial
 - Individu hidup dalam lingkungan sosial oleh karena itu kepribadian individu dibentuk oleh kepribadian lingkungan sosial
- Perspektif komunikasi
 - Identitas dibangun melalui interaksi dan komunikasi antara seorang pribadi dan kelompok
- Pendekatan praktis
 - Identitas dibangun dalam suatu konteks (ekonomi, politik, sejarah)
 - Identitas selalu bergerak/dinamis

- Pembentukan identitas budaya
- Konsep identitas selalu terkait peran yang diharapkan

Proses terbentuknya identitas budaya

- Identitas budaya yang tidak disengaja (ikut-ikutan terhadap budaya yang lebih dominan)
- Pencarian identitas budaya. (melalui proses penjajakan, bertanya dan uji coba) Contoh: biarawan/wati
- Identitas budaya yang diperoleh. (contoh: internalisasi peran sebagai dosen, anggota TNI)
- Resistensi dan separatisme: Penolakan terhadap (norma-norma) budaya dominan. (aliran agama)
- Integrasi: integrasi budaya beberapa budaya yang menghasilkan budaya baru

Jenis identitas dan komunikasi antar budaya :

- Identitas gender, ras, umur, etnik, agama, kelas, bangsa, dan pribadi
- Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi antar budaya:
 - Etnosentrisme
 - Stereotip
 - Prasangka

- Diskriminasi
- Rasisme
- Dominasi dan subordinasi antar kelompok

V. Pengertian Komunikasi Lintas Budaya dan Karakteristiknya

Komunikasi lintas budaya sendiri didefinisikan sebagai :

1. Komunikasi yang dilakukan oleh dua kebudayaan atau lebih
2. Komunikasi yang dilakukan sebagai akibat dari terjalinnya komunikasi antar unsur kebudayaan itu sendiri, seperti komunikasi antar masyarakatnya.

Karakteristik Komunikasi Lintas Budaya:

- Ada dua atau lebih kebudayaan yang terlibat dalam komunikasi
- Ada jalan atau tujuan yang sama yang akhirnya menciptakan komunikasi itu
- Komunikasi Lintas budaya menghasilkan keuntungan dan kerugian diantara dua budaya atau lebih yang terlibat,
- Komunikasi lintas budaya dijalin baik secara individu anggota masyarakat maupun dijalin secara berkelompok

atau dewasa ini dapat dilakukan melalui media,

- Tidak semua komunikasi lintas budaya menghasilkan feedback yang dimaksud, hal ini tergantung kepada penafsiran dan penerimaan dari sebuah kebudayaan yang terlibat, mau atau tidaknya dipengaruhi,
- Bila dua kebudayaan melebur karena pengaruh komunikasi yang dijalin maka akan menghasilkan kebudayaan baru, dan inilah yang disebut akulturasi

VI. Alasan mempelajari komunikasi lintas budaya menurut Litvin (1977) :

1. Dunia sedang menyusut dan kapasitas untuk memahami keanekaragaman budaya sangat diperlukan.
2. Semua budaya berfungsi dan penting bagi pengalaman anggota-anggota budaya tersebut meskipun nilai-nilainya berbeda.
3. Nilai-nilai setiap masyarakat se”baik” nilai-nilai masyarakat lainnya.
4. Setiap individu dan/atau budaya berhak menggunakan nilai-nilainya sendiri.

5. Perbedaan-perbedaan individu itu penting, namun ada asumsi-asumsi dan pola-pola budaya mendasar yang berlaku.
6. Pemahaman atas nilai-nilai budaya sendiri merupakan prasyarat untuk mengidentifikasi dan memahami nilai-nilai budaya lain.
7. Dengan mengatasi hambatan-hambatan budaya untuk berhubungan dengan orang lain kita memperoleh pemahaman dan penghargaan bagi kebutuhan, aspirasi, perasaan dan masalah manusia.
8. Pemahaman atas orang lain secara lintas budaya dan antar pribadi adalah suatu usaha yang memerlukan keberanian dan kepekaan. Semakin mengancam pandangan dunia orang itu bagi pandangan dunia kita, semakin banyak yang harus kita pelajari dari dia, tetapi semakin berbahaya untuk memahaminya.
9. Keterampilan-keterampilan komunikasi yang diperoleh memudahkan perpindahan seseorang dari pandangan yang monokultural terhadap interaksi manusia ke pandangan multikultural.
10. Perbedaan-perbedaan budaya menandakan kebutuhan akan penerimaan dalam komunikasi, namun perbedaan-perbedaan tersebut secara arbitrer tidaklah menyusahkan atau memudahkan.
11. Situasi-situasi komunikasi antar budaya tidaklah statik dan bukan pula stereotip. Karena itu seorang komunikator tidak dapat dilatih untuk mengatasi situasi. Dalam konteks ini kepekaan, pengetahuan dan keterampilannya bisa membuatnya siap untuk berperan serta dalam menciptakan lingkungan komunikasi yang efektif dan saling memuaskan.

VII. Esensi Komunikasi Manusia

- Komunikasi adalah proses dinamik
- Komunikasi adalah simbol
- Komunikasi adalah bagian dari sebuah sistem besar seperti setting, lokasi, acara, waktu dan jumlah yang terlibat
- Komunikasi meningkatkan pembuatan pengertian/rujukan pelakunya
- Komunikasi sebagai refleksi diri

- Komunikasi selalu mempunyai konsekuensi
- Komunikasi adalah kompleks

VIII. Fakta Etnis Cina Di Indonesia Sebagai Bukti Komunikasi Lintas Budaya

ketika penjajahan berlangsung etnis dari negara-negara lain seperti Cina, India ataupun Arab selain bangsa penjajah itu sendiri sudah berdiam di Indonesia. Keberadaan etnis yang berasal dari luar Indonesia itu tidak dibawa oleh bangsa penjajah ataupun ikut menjajah sehingga mereka tidak melekat dengan bangsa penjajah tersebut. Mereka beraktivitas pada bidang lain, terutama di bidang perdagangan. Oleh karena itu, undangan untuk aktif mengembangkan Indonesia secara implisit juga terbuka bagi etnis Cina, Arab ataupun India, sepanjang mereka berorientasi kepada kemajuan Indonesia kelak. Artinya, penolakan menjadi warga negara Indonesia tidak didasarkan kepada latar belakang etnis, tetapi lebih diarahkan kepada orang per orang. Dengan demikian, ideologi anti-Cina sebenarnya tidak dikenal dalam proses pembentukan negara Indonesia merdeka. Penolakan menjadi warga negara Indonesia mengikuti pemikiran dr. Tjipto berlaku bagi orang per orang tanpa memandang etnis yang

bersangkutan. Sekalipun ia dikategorikan sebagai pribumi, kalau memang perilakunya itu tidak berorientasi pada pengembangan Indonesia melainkan hanya membangun kepentingan pribadinya sendiri, maka orang tersebut bukanlah “warga negara Indonesia”. Walaupun proses pengakuan etnis Cina sebagai bagian dari warga negara Indonesia sudah dimulai sejak masa penjajahan dahulu, tampaknya keberadaan etnis Cina sebagai bagian dari bangsa Indonesia belum berjalan mulus, atau etnis Cina belum diterima oleh etnis "asli" penghuni negeri ini secara optimal. Perlakuan terhadap etnis Cina sangat berbeda dengan perlakuan terhadap orang India ataupun orang Arab yang ada di Indonesia ini.

Konflik: Disharmoni dan Diskriminasi antara etnis Cina dan non-Cina Adanya konflik antar etnis yang selalu membawa korban pada etnis Cina memberi indikasi bahwa hubungan antar etnis khususnya antara etnis Cina dengan etnis "asli" Indonesia tidak harmonis.

Dimintanya surat balik nama terkait dengan peraturan yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah berupa Surat Edaran Presidium Kabinet RI No. SE-06/PresKab/6/1967, tentang kebijakan pokok WNI terutama untuk mencegah terjadinya kehidupan eksklusif rasial, serta adanya

anjuan supaya WNI keturunan asing yang masih menggunakan nama Cina diganti dengan nama Indonesia. Hal penggantian nama ini sebenarnya sudah muncul pada masa Pemerintahan Soekarno. Pada tahun 1961, Soekarno mengeluarkan peraturan untuk mengganti nama Cina menjadi nama yang terdengar seperti nama Indonesia. Namun, peraturan ini hanya berupa anjuan saja bukan sebagai paksaan. Sejak saat itulah, warga etnis Cina khususnya yang telah WNI banyak mengganti namanya menjadi nama "Indonesia" (Suryadinata, 1999: 42). Kecenderungan untuk menggunakan nama "Indonesia" masih berlangsung hingga era reformasi ini. Sementara ketika status kewarganegaraan itu dipertanyakan, hal itu terkait dengan pemberlakuan peraturan tentang SKBRI. Akan tetapi, SKBRI yang tadinya wajib bagi WNI etnis Cina, dengan keluarnya Keppres No. 56 tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak berlaku lagi, maka dalam Keppres itu ditegaskan bahwa bukti kewarganegaraan cukup ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Akta Kelahiran seharusnya tidak berlaku lagi. Pada masa Presiden BJ. Habibie pun, Intruksi Presiden No. 4 tahun 1999 juga dikeluarkan. Isi Inpres itu adalah memerintahkan semua instansi agar memberikan layanan yang sama

terhadap semua warga negara, tanpa mempersoalkan SKBRI (<http://kabarberita.blogdrive.com/comments?id=17>). Pengelompokan Etnis Cina Sering warga "asli" atau "pribumi" memandang etnis Cina secara homogen, padahal tidak demikian adanya. Dalam komunitas etnis Cina terdapat keheterogenitasan, seperti kelompok pribumi Indonesia. Dari sisi tempat lahir dan penggunaan bahasa saja, secara kultural etnis Cina yang jumlahnya lebih dari lima juta orang dapat dikelompokkan atas dua bagian (Suryadinata, 1999: 170). Pertama, adalah kelompok etnis Cina peranakan. Mereka ini lahir di Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, tidak saja kepada warga pribumi juga sesama mereka yang berasal dari etnis Cina itu sendiri. Etnis Cina peranakan ini banyak terdapat di Pulau Jawa. Mereka inipun sudah kehilangan kefasihannya berbicara dalam bahasa Cina karena mereka sudah banyak menyerap unsur kebudayaan pribumi tempat di mana etnis Cina peranakan ini bermukim (Suryadinata, 1999: 170-171) ataupun sebaliknya. Dalam hal ini, antara kebudayaan Cina dan kebudayaan pribumi sudah terjadi dialektika. Oleh karena itu, untuk memberi sebutan kepada mereka ini sering dikaitkan dengan salah satu etnik "asli" di mana unsur kebudayaannya diserap

seperti "Cina Betawi" atau "Cina Jawa". Etnis Cina kelompok peranakan ini terkadang secara fisik tidak berbeda dengan ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh kebanyakan warga pribumi. Misalnya, kebanyakan bentuk mata etnis Cina adalah sipit dan kulit berwarna putih (ras mongoloid). Kendati demikian, mereka yang berasal dari etnik Cina peranakan ini sudah banyak yang memiliki mata dengan tingkat kesipitannya yang tidak lagi menonjol. Selain itu, warna kulit mereka sudah banyak yang mengarah ke kecoklat-coklatan bahkan ada yang lebih gelap dari pada warna kulit warga pribumi Indonesia. Kedua, kelompok etnis Cina totok. Tempat lahir mereka ini berada di luar negeri atau sebagian besar terletak di negeri Cina. Mereka ini bermigrasi ke Indonesia pada abad 19 dan 20. Kelompok ini merupakan gelombang migrasi terakhir secara besar-besaran. Oleh karena mereka ini masih asli dari negeri Cina sana, maka baik bahasa yang digunakan dan kebudayaan yang diekspresikan masih bernuansa Cina. Ringkasnya, mereka ini masih orang Cina. Hal ini ditegaskan secara hukum bahwa mereka ini masih dikelompokkan sebagai warga negara asing (WNA).

Fujitsu Research di Tokyo mengemukakan bahwa dari daftar perusahaan-perusahaan yang ada di

Indonesia, sekitar 73 % dikuasai oleh etnis Cina (aspirasikaltim, 4/5/2004). Dengan adanya dominasi seperti itu mengakibatkan kegiatan perekonomian Indonesia sangat tergantung kepada etnis Cina ini. Keunggulan dalam bidang perdagangan atau bisnis ini terletak pada sikap kewirausahaan serta sikap tanggap terhadap peluang komersial perantauan (Supriatma, 1996: 71). Sikap kewirausahaan etnis Cina di semangati oleh ajaran konfusioneisme (Sudiarji, 1996) dan nilai hopeng, hong sui, dan hokie. Hopeng adalah salah satu nilai penentu perilaku bisnis golongan Cina, yang berarti cara untuk menjaga hubungan baik dengan relasi bisnis. Bisnis tidak seluruhnya "rasional" sehingga hubungan dengan relasi sangat penting. Tanpa hubungan yang baik dengan relasi maka dipastikan sebuah usaha tidak akan berkembang. Hong Sui adalah menyangkut kepercayaan, yaitu kepercayaan pada faktor-faktor alamiah yang menunjang nasib baik dan nasib buruk manusia. Hong sui memberi petunjuk tentang bidang-bidang atau wilayah yang sesuai dengan keberuntungan

baik dalam hidup sehari-hari maupun dalam peruntungan perdagangan. Hokie adalah nilai yang menyangkut peruntungan dan nasib baik. Dalam hal ini, hokie lebih

dipersepsikan bagaimana menyiasati nasib agar(selalu) mendapat nasib baik (Handoko, 1996). Sikap kewirausahaan yang ditampilkan itu telah membuat etnis Cina mampu membangun jaringan yang luas dan potensial untuk mengembangkan bisnis. Jaringan sosial etnis Cina disebut guanxi. Semangat yang ada dalam guanxi ini adalah semangat untuk mengembangkan dan melindungi sumber pendapatan keluarga agar kelangsungan hidup dapat terjamin. Jaringan sosial itu tercipta karena mengumpulkan kekayaan di suatu keluarga tidak dapat diatur dalam isolasi, ia harus menjual dan membeli, bertukar informasi, meminjam uang, atau mencari saran. Dalam hal ini etnis Cina menekankan pentingnya rasa saling percaya, walaupun terbatas hanya sebagai parter kerja sama. Makin kuat rasa percaya seseorang, makin kuat kerja samanya. Oleh karena itu, orang Cina tidak mudah percaya dan cenderung baru percaya setelah melakukan kerja sama (Redding, 2002: 67-68). Tanpa jaringan yang luas, sebuah usaha tidak dapat berkembang. Jaringan yang dibangun itu mengakibatkan modal Cina lebih berhasil dalam kompetisi ekonomi dibandingkan dengan pribumi. Golongan pribumi yang tidak memiliki jaringan bisnis yang luas, hal itu menjadi rintangan utama (Kunio, 1990: 76-77). Golongan pedagang pribumi tidak

mampu menjangkau daerah-daerah bisnis yang lebih luas, apalagi untuk mencapai kawasan perdagangan pada level internasional. Jaringan bisnis etnis Cina tidak saja dalam bidang distribusi tetapi juga jaringan untuk masuk pada sumber-sumber permodalan. Hal ini dimungkinkan karena yang menjadi pemilik sumber-sumber permodalan itu adalah etnis Cina sendiri. Sementara bagi pribumi, mereka relatif sulit untuk memperoleh kucuran kredit, sebab orang Cina-lah yang memonopoli jaringan ke sumber-sumber perkreditan tersebut. Orang Cina akan senang berbisnis dengan sesamanya, sedangkan warga pribumi tidak mereka percayai.

mengakui bahwa Khonghucu merupakan salah satu dari enam agama resmi di Indonesia. Pengakuan itu semakin dipertegas lagi dengan Penpres No.5/1969. Oleh karena Khonghucu tidak diakui sebagai sebuah agama, maka kegiatan "keagamaan" Khonghucu dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi oleh para penganutnya. Padahal, oleh pemerintah Orde Baru, peraturan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Orde Lama tersebut tidak pernah dinyatakan dicabut. Memasuki era reformasi ini tampaknya seluruh simbol-simbol yang berbau etnis Cina sudah dapat dipertontonkan kepada khayalak ramai. Pertunjukkan

barongsai yang tidak mungkin dinikmati oleh masyarakat Indonesia selama rezim Orde Baru, kini secara bebas sudah dapat disaksikan oleh seluruh lapisan masyarakat, karena pemerintah tidak lagi melarangnya. Bahkan, hari perayaan tahun baru Imlek mulai tahun 2003 dinyatakan oleh Presiden Megawati sebagai hari libur nasional. Kecuali etnis Cina yang menganut agama Islam, tampaknya agama lain yang dianut oleh orang etnis Cina lain merupakan salah satu faktor yang membuat pembauran mereka dengan etnis "asli" menjadi tertutup. Sebab, di antara sesama etnis pribumi Indonesia sendiri tetapi berbeda latar belakang agama masih sering terjadi gesekan, apalagi dengan etnis Cina yang berbeda secara sosiokultural.

Sebenarnya mereka yang hidup secara eksklusif ini tidak seluruh etnis Cina. Sebab masih ada warga etnis Cina yang mampu memperlihatkan sikap pembauran yang tinggi. Akan tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak dan mereka ini dapat dikategorikan kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi. Kelompok yang bersedia membaurkan diri dengan warga "asli" ini adalah untuk mencari jaminan sosial (social security) dari warga "asli". Sebab, kelompok etnis Cina yang mampu secara ekonomi ini tampaknya kurang cocok berbaur dengan

etnis Cina lain yang sukses secara ekonomi, akibat di antara mereka pun sebenarnya ada juga kesenjangan ekonomi.

IX. Penutup

Keberadaan etnis Cina di Indonesia sudah berlangsung lama. Bahkan etnis Cina sudah bermukim di negeri ini jauh sebelum Indonesia merdeka. Tetapi dalam realitanya, etnis Cina masih dikategorikan sebagai warga asing yang belum dapat terintegrasikan secara total dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal itu ditunjukkan oleh adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh Gesekan antar golongan beragama yang melibatkan etnis pribumi di Indonesia

seseorang yang berasal dari etnis Cina layaknya orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Sisi lain adalah, hubungan warga "asli" Indonesia dengan etnis Cina belum terjalin dengan harmonis akibat selain perbedaan kultural yang tidak bisa dihindari, adalah juga perbedaan dalam kesempatan ekonomi. Keunggulan di bidang ekonomi yang berakibat pada keunggulan untuk menghimpun kekayaan memposisikan mereka berada padatingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan warga pribumi dalam status sosial masyarakat Indonesia. Kondisi

itu memposisikan etnis Cina merupakan golongan yang eksklusif. Keadaan itu terus terpelihara dan merekatidak membuka jalan pembauran dengan sesama warga "asli" lain. Akibatnya adalah "jarak" etnis Cina dengan warga "asli" semakin jauh. Sikap seperti itu menciptakan ketidaksenangan pada kelompok pribumi, sehingga bila ada konflik sekecil apapun dengan etnis Cina, yang dikedepankan oleh warga "asli" adalah sikap "anti Cina". Agar persoalan hubungan etnis di Indonesia dapat terpelihara dengan baik, sudah selayaknya penyebutan warga negara pribumi dan non-pribumi dihilangkan. Istilah dengan pengkategorian seperti itu sudah menciptakan dikotomi tersendiri dengan segala konsekuensinya. Hal yang perlu ditanamkan pada masyarakat Indonesia melalui media pendidikan bahwa Indonesia itu multi etnik, multi agama, multi adat istiadat, yang satu sama lain harus hidup berdampingan untuk membangun Indonesia yang kuat. Kemudian, pemerintah sudah waktunya menghilangkan diskriminasi di antaraetnik-etnik yang ada di Indonesia ini, sebab pendiskriminasian seperti yangdialami oleh etnis Cina selama ini akan sulit menghilangkan perbedaan. Karena, dengan adanya pendiskriminasian sekaligus menunjukkan adanya perbedaan. Oleh karena itu, WNI etnis Cina pun tidak

menganggapnya sebagai etnis yang paling unggul yang dapat menciptakan sentimen keetnisan. Selain itu, intropeksi ke dalam perlu juga dilakukan oleh etnis Cina itu sendiri. Sebab, kendati etnis Cina sudah lama bermukim di Indonesia ini, tampaknya adaptasi yang dilakukan selama ini masihbelum berhasil mengingat setiap terjadinya kerusuhan tidak jarang melibatkanetnis Cina selaku pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, alternatif dari strategi adaptasi yang dilakukan selama ini perlu dicari dan dimunculkan.

DAFTAR PUSTAKA

Aspirasikaltim 2004 "Perilaku Ekonomi Etnis Cina di Indonesia sejak tahun 1930-an hingga Pasca Orde Baru", dalam <http://www.aspirasikaltim.com/detail-news.asp?idnews-225>. (Diambil tanggal 5 Januari 2005).

Dahana, A. 1999 "Cina Perantauan, Linkage Ekonomi dan Upaya Pembauran", dalam Moch Sa'dun M (editor) *Pri-Nonpri: mencari Format Baru Pembauran*. Jakarta: CIDES. Hlm. 157- 169.

Djie, Liem Twan 1995 *Perdagangan Perantara Distribusi Orang-Orang Cina di Jawa*. Jakarta: Gramedia.

Handoko, T. Hani 1996 "Tradisi (Manajemen) Dagang ala Tionghoa", dalam (tanpa nama editor) *Pengusaha Ekonomi dan*

Siasat Pengusaha Tionghoa. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 51 - 62.

Herlianto 2003 "Masalah Cina 3" dikutip dari Kompas, 3 Juli 2003, dalam <http://www.yabina.org/artikel/A6.01.HTM>, (diambil tgl. 5 Januari 2005).

Kunio, Yoshihara 1990 Kapitalisme Semu Asia Tenggara. Jakarta: LP3ES.

Kwartanada, Didi 1996 "Minoritas Tionghoa dan Fasisme Jepang: Jawa, 1942 - 1945" dalam (tanpa nama editor) Pengusaha Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 24 - 41.

Liem Twan Djie 1996 Perdagangan Perantara Distribusi Orang-Orang Cina di Jawa. Jakarta: Gramedia.

Ong Hok Ham 1999 "Pri-Nonpri: Perspektif Historis Rasialisme di Indonesia dan Sistem Ekonomi Kita", dalam Moch Sa'dun M (editor) Pri-Nonpri: mencari Format Baru Pembauran. Jakarta: CIDES. Hlm. 33-44.

Redding, S Gordon 2002 Jiwa Kapitalisme Cina (terjemahan). Jakarta: Abdi Tandır.

Rochmawati 2004 "Pembauran yang tak Pernah Selesai" dalam Masyarakat dan Budaya, 6(2): 105-118, Jakarta: PMB.

Ruben Brent D dan Lea P Stewart. (2006). Communication and Human Behavior. United States: Allyn and Bacon

Siburian, Robert 1999 "Eksodus Etnis Tionghoa" dalam harian Suara Bangsa, 21 Mei. Hlm. 4.

Sjaifuddin, Hatifah dan Erna Ermawati C. 1994 Dimensi Strategi Pengembangan Usaha Kecil. Bandung: Akatiga.

Sudiarja, A. 1996 "Ajaran Konfusianisme dalam Perspektif Keagamaan Tionghoa", dalam (tanpa nama editor) Pengusaha Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 24 - 41.

Supriatma, A. Made Tony 1996 "Bisnis dan Politik: Kapitalisme dan Golongan Tionghoa di Indonesia" dalam (tanpa nama editor) Pengusaha Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 64 - 91.

Suryadinata, Leo 1999 Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa. Jakarta: LP3ES. 2000 Politik Tionghoa Peranakan di Jawa. Jakarta: Sinar Harapan.

Warsilah, Henny 2000 "Kaitan Etnisitas dengan Konflik Sosial dan Kekerasan Massa, di Tiga Daerah di Indonesia" dalam Masyarakat dan Budaya, 3(1): 21 - 43, Jakarta: PMB-LIPI.

Thee Kian Wie 1995 "Kata Pengantar" untuk buku karangan Liem Twan Djie, Perdagangan Perantara Distribusi Orang-Orang Cina di Jawa. Jakarta: Gramedia. Hlm. xiii - xx.

Uchjana Effendi, Onong 1992 "Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek, Remaja Rosdakarya, Bandung